SIMAK BPK RI
SISTEM MANAJEMEN KINERJA
New BPK Leading by Example

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

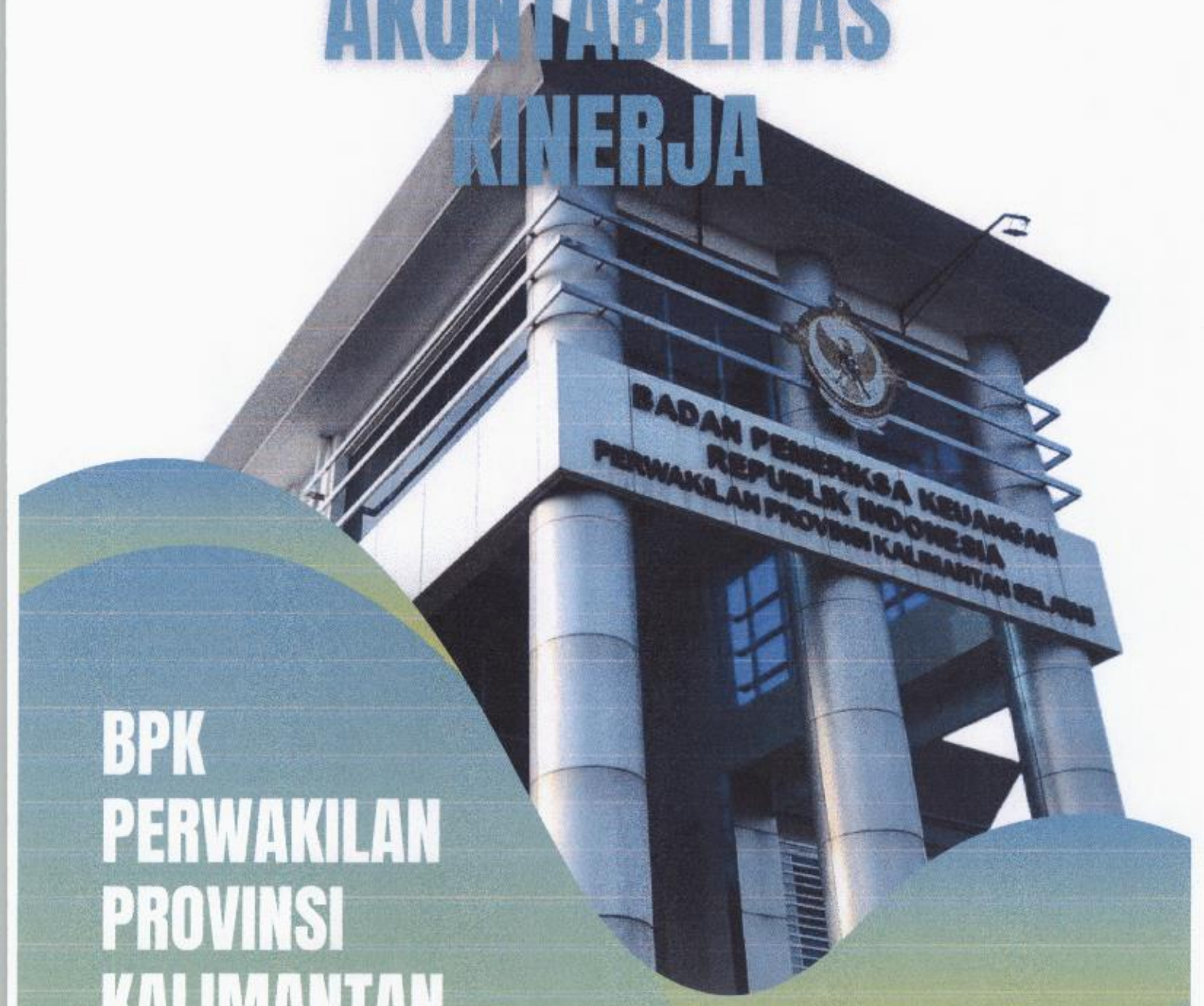

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu unit pelaksana dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku unsur penyelenggara negara, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. LAK ini merupakan cerminan dari pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2021.

LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan disusun sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. LAK ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja.

Selanjutnya LAK ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan secara khusus dan BPK RI secara keseluruhan.

Banjarbaru, 31 Januari 2022

Kepala Perwakilan

M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA.
NIP 196909291996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

DAFTAR GAMBAR 5

BAB I PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang 6

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 7

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 9

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 10

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 13

A. Perencanaan Strategis 13

B. Perjanjian Kinerja 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA) BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 18

A. Pencapaian Skor Indikator Kinerja 18

B. Capaian Skor Lima Tahun Terakhir 19

C. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Skor Indikator Kinerja 20

D. Anggaran dan Realisasi 39

BAB IV PENUTUP 41

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Komposisi SDM
2. Rincian Pagu Anggaran RKP
3. Rincian Pagu Anggaran RKSP
4. Target Pencapaian Kinerja Tahun 2021
5. Pencapaian Kinerja Tahun 2021
6. Perbandingan IKU 1 Tahun 2021 dan 2020
7. Perbandingan Realisasi IKU 1 terhadap Target Jangka Menengah
8. Perbandingan IKU 2 Tahun 2021 dan 2020
9. Perbandingan Realisasi IKU 2 terhadap Target Jangka Menengah
10. Perbandingan IKU 3 Tahun 2021 dan 2020
11. Perbandingan Realisasi IKU 3 terhadap Target Jangka Menengah
12. Perbandingan IKU 4 Tahun 2021 dan 2020
13. Perbandingan Realisasi IKU 4 terhadap Target Jangka Menengah
14. Perbandingan IKU 5 Tahun 2021 dan 2020
15. Perbandingan Realisasi IKU 5 terhadap Target Jangka Menengah
16. Perbandingan IKU 6 Tahun 2021 dan 2020
17. Perbandingan Realisasi IKU 6 terhadap Target Jangka Menengah
18. Perbandingan IKU 7 Tahun 2021 dan 2020
19. Perbandingan Realisasi IKU 7 terhadap Target Jangka Menengah
20. Perbandingan IKU 8 Tahun 2021 dan 2020
21. Perbandingan Realisasi IKU 8 terhadap Target Jangka Menengah
22. Perbandingan IKU 9 Tahun 2021 dan 2020
23. Perbandingan Realisasi IKU 9 terhadap Target Jangka Menengah
24. Perbandingan IKU 10 Tahun 2021 dan 2020
25. Perbandingan Realisasi IKU 10 terhadap Target Jangka Menengah
26. Perbandingan IKU 11 Tahun 2021 dan 2020
27. Perbandingan Realisasi IKU 11 terhadap Target Jangka Menengah
28. Perbandingan IKU 12 Tahun 2021 dan 2020
29. Perbandingan Realisasi IKU 12 terhadap Target Jangka Menengah
30. Perbandingan IKU 13 Tahun 2021 dan 2020
31. Perbandingan Realisasi IKU 13 terhadap Target Jangka Menengah

32. Perbandingan Anggaran dan Realisasi RKP 2021
33. Perbandingan Anggaran dan Realisasi RKSP 2021
34. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Tahun 2019 s.d. 2021

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi
2. Alur Pikir Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024
3. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024
4. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024
5. Grafik Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2017 s.d. 2021
6. Grafik Perkembangan Anggaran dan Realisasi Tahun 2019 s.d. 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur–unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) di antaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu satuan kerja pada Auditorat Keuangan Negara VI berkewajiban menyusun dan menyampaikan LAK kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan kebijakan berdasarkan Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga merupakan cerminan dari prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2021. Adapun tujuan penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

AKN VI didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN VI dalam melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas:

1. **Sekretariat Perwakilan**

   Sekretariat perwakilan bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

   Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan Subbagian Hukum.

2. **Subauditorat Kalimantan Selatan I**

   Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan I adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. **Subauditorat Kalimantan Selatan II**

   Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan II adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

   Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Subauditorat Kalimantan I dan II adalah sebagai berikut.

   a. Merumuskan rencana kegiatan;
   b. Mengusulkan tim pemeriksa;
   c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
   d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
   e. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
   f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbagan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;

i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan

l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. Struktur Organisasi

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki SDM per 31 Desember 2021 sebanyak 136 orang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1. Komposisi SDM

Uraian	Jumlah (Orang)
Kepala Perwakilan	1
Kepala Subauditorat	2
Kepala Sekretariat	1
Kepala Subbagian	5
Pemeriksa	79
Pejabat Pelaksana	28
Tenaga Tidak Tetap	14
CPNS Angkatan 2020	6
Jumlah	136

2. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp22.049.063.000,00 yang terdiri dari anggaran untuk kegiatan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp9.320.339.000,00 dengan target 267 keluaran dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebesar Rp12.728.724.000,00 dengan target 23 keluaran. Adapun rincian anggaran RKP dan RKSP tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Rincian Pagu RKP

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
1.	LHP BPK Perwakilan	5.059.777.000,00	25 LHP
2.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	242.226.000,00	130 LHP
3.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	2.853.541.000,00	26 LHP
4.	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	538.995.000,00	1 LHP
5.	Laporan pemantauan TLHP	98.058.000,00	28 Laporan
6.	Laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah	201.522.000,00	28 Laporan
7.	Rumusan Bahan Pendapat	9.063.000,00	1 Rumusan
8.	Layanan Administrasi Pemeriksaan	259.548.000,00	12 Laporan
9.	Sumbangan IHPS	45.612.000,00	2 SIHPS
10.	Laporan Profil Entitas	11.997.000,00	14 Laporan
	Jumlah	**9.320.339.000,00**	**267 Keluaran**

Tabel 3. Rincian Pagu RKSP

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
1.	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.656.459.000,00	20 Laporan
a.	Layanan Tata Usaha	233.399.000,00	
b.	Layanan Kehumasan	217.600.000,00	
c.	Layanan SDM	278.702.000,00	
d.	Layanan Keuangan	229.805.000,00	
e.	Layanan Umum dan TI	387.958.000,00	
f.	Layanan Hukum	168.241.000,00	
g.	Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK	109.225.000,00	
h.	Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	31.529.000,00	
2.	Layanan Sarana Internal	206.998.000,00	2 Unit
3.	Layanan Perkantoran	10.865.267.000,00	1 Layanan
a.	Gaji dan Tunjangan	7.394.399.000,00	
b.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.470.868.000,00	
1)	Layanan Perkantoran Bidang TU	318.839.000,00	
2)	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	38.400.000,00	
3)	Layanan Perkantoran Bidang SDM	135.568.000,00	
4)	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	236.640.000,00	
5)	Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	2.741.421.000,00	
	Jumlah	**12.728.724.000,00**	**23 Keluaran**

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Perencanaan Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK. Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 disusun selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 dalam rangka meningkatkan peran dan manfaat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 2. Alur Pikir Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Selatan 2020 – 2024

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil

pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara;
3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dukungan pada pernyataan misi pertama yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Dukungan pada misi kedua yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian. Dukungan pada misi ketiga yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola melalui reformasi birokrasi sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi sumber daya organisasi pada setiap aspek, mengembangkan budaya integritas, independen, dan profesional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". Selaras dengan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Sasaran Strategis 2020-2024 "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi". Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar sehinga diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK.

Selanjutnya, untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Visualisasi Renstra BPK 2020 – 2024

Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan AKN VI, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung Strategi 2 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level insight dan foresight, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi focal point dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan implementasi SDG's sebagai agenda internasional. Dalam Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Sasaran Strategis untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi dengan sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatnya pemeriksaan berkualitas; dan
2) Meningkatnya layanan pemeriksaan.

Bentuk visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 adalah sebagai berikut.

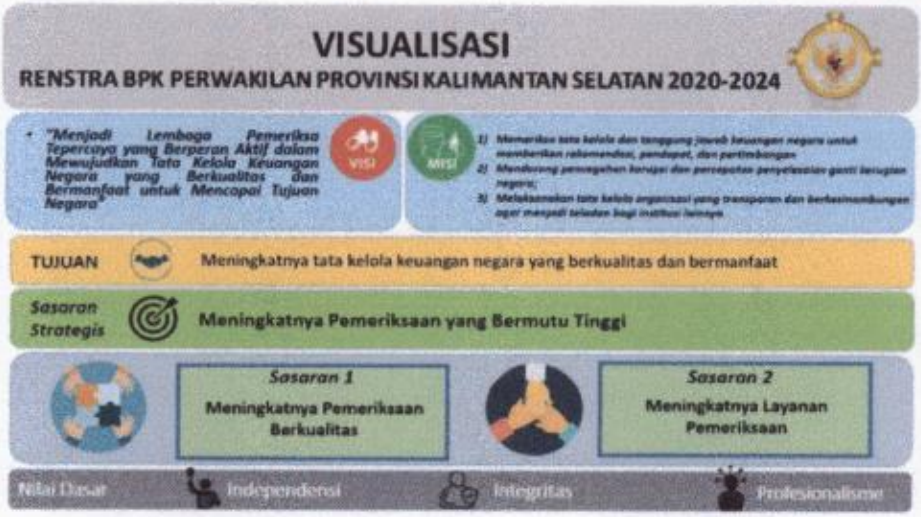

Gambar 4. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Selatan 2020 – 2024

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi", BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8) Hasil Evaluasi AKIP;
9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
13) Tingkat Kinerja Anggaran.

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Auditor Utama Keuangan

Negara VI selaku Pejabat Eselon I dan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pejabat Eselon II, serta diketahui oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota VI BPK. Berikut Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.

Tabel 4. Target Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas; dan • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp23.766.943.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp9.773.076.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	Rp13.993.867.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Pencapaian Skor Indikator Kinerja

Skor pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sebesar 100,36. Skor pencapaian kinerja tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mendapatkan skor kinerja 100,35. Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja 2021		Kinerja 2021		
		Target	Realisasi	Skor
Skor Kinerja Keseluruhan				**100,36**
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90,67%	90,67
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,94%	105
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,43%	100,43
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,39%	100,39
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,49)	89,8
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	AA (93,14)	105
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	98,36%	102,46
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,95)	103,95
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	91,38%	104,43

Secara keseluruhan, skor pencapaian kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Terdapat dua indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
   a. IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; dan
   b. IKU 7 tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.
2. Terdapat empat indikator kinerja yang telah mencapai target atau sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu:
   a. IKU 2 tentang Tingkat Kesesuain Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
   b. IKU 5 tentang Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
   c. IKU 10 tentang Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; dan
   d. IKU 12 tentang Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.
3. Terdapat tujuh indikator kinerja yang telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
   a. IKU 3 tentang Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
   b. IKU 4 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
   c. IKU 6 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
   d. IKU 8 tentang Hasil Evaluasi AKIP;
   e. IKU 9 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
   f. IKU 11 tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; dan
   g. IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran.

B. Capaian Skor Lima Tahun Terakhir

Berikut ini adalah pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2017 s.d. 2021.

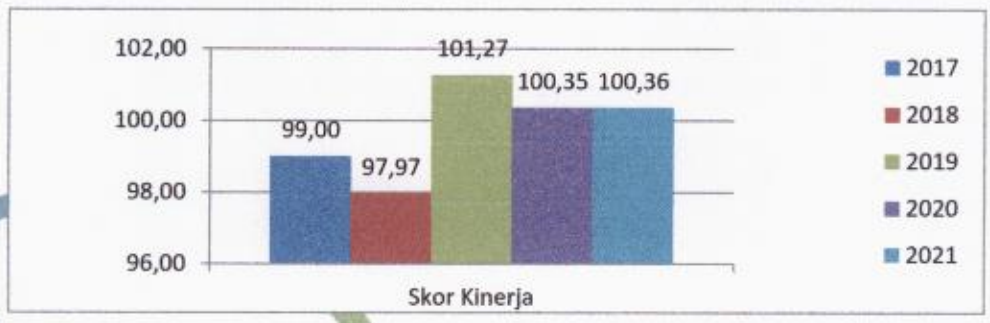

Gambar 5. Grafik Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2017 s.d. 2021

Rincian skor per indikator kinerja tidak dapat dibandingkan dikarenakan terdapat perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2020 dan 2021 dengan tahun 2017 s.d. 2019 karena diukur berdasarkan periode Renstra yang berbeda.

C. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Skor Indikator Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021. Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 100,36. Adapun penjelasan capaian indikator kinerja tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

   Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan dengan mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan, yaitu internal satuan kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui Hasil Evaluasi EPP dan Hasil Reviu Itama. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan QA dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada seluruh satuan kerja pemeriksaan dengan metode *sampling*.

   Realiasasi capaian IKU 1 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Perbandingan IKU 1 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90,67%	89,29%

Berdasarkan pengukuran, Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada tahun 2021 sebesar 90,67%, **lebih rendah dari target** yang ditetapakn sebesar 100%. Capaian tersebut diukur melalui tiga sub IKU, yaitu (1) Sub IKU 1.1 tentang Hasil QA dan QC dengan realisasi sebesar 100%; (2) Sub IKU 1.2 tentang Hasil Evaluasi EPP dengan realisasi sebesar 81,33%; dan (3) Sub IKU 1.3 tentang Hasil Reviu Itama dengan realisasi sebesar 100%.

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan QA dan QC berjenjang atas 28 (dua puluh delapan) LHP yang telah diterbitkan. Selain itu, capaian Hasil Evaluasi LHP yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi dan Perencanaan Pemeriksaan (EPP) sebesar 81,33%. Capaian tersebut terdiri atas tingkat konsistensi atas LHP sebesar 53,33% dan tingkat akurasi LHP sebesar 100%. Capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Adapun capaian Hasil Reviu Itama yaitu sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan telah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Perbandingan capaian IKU 1 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi IKU 1 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	90,67%	90,67%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU 1 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya berusaha meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik, dan PMP.

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan pelaksanaan evaluasi EPP melalui daring. Manfaat pelaksanaan evaluasi EPP secara daring antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas.

2. **IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP yang diterbitkan oleh satuan kerja pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP.

Realiasasi capaian IKU 2 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Perbandingan IKU 2 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%

Pencapaian IKU 2 pada tahun 2021 sebesar 100% atau **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Direktorat EPP, simpulan dalam 28 (dua puluh delapan) LHP yang telah diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam P2.

Perbandingan capaian IKU 2 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi IKU 2 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU 2 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan.

3. **IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada entitas yang diperiksa. Realiasasi capaian IKU 3 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Perbandingan IKU 3 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,94%	78,99%

Pencapaian IKU 3 pada tahun 2021 sebesar 78,94% atau **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan. Namun, mengalami penuruan dari realisasi tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan rekomendasi atas LHP BPK, namun tidak diiringi dengan penambahan tindak lanjut secara signifikan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan secara penuh Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dalam melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Adapun pencapaian IKU 3 pada tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 9.925;
b. Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 2.393;
c. Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 379;
d. Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 463; dan
e. Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada auditee sebanyak 13.160.

Data tersebut merupakan data yang bersumber dari Direktorat EPP berdasarkan data IHPS Semester II Tahun 2021.

Perbandingan capaian IKU 3 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi IKU 3 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	78,94%	105,25%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU 3 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan optimis dapat memenuhi target sampai tahun 2024 dengan terus berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan pemanfaatan teknologi dan informasi berupa Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Manfaat yang diperoleh berupa kemudahan akses bagi satker dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

4. **IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode Renstra, serta isu-

isu strategis lain yang berkembang di masyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Realiasasi capaian IKU 4 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan IKU 4 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,43%	100,82%

Pencapaian IKU 4 pada tahun 2021 sebesar 100,43% atau **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan. Capaian realisasi di atas berdasarkan delapan pemeriksaan strategis tematik nasional yang dilaksanakan dibandingkan dengan delapan rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional serta ditambah dengan alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan sebesar 0,43%.

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan delapan pemeriksaan tematik nasional yaitu tiga pemeriksaan kinerja atas pendidikan dan pelatihan vokasi dan lima pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2021.

Perbandingan capaian IKU 4 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi IKU 4 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,43%	100,43%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU 4 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDG's sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan.

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan pemanfaatan teknologi dan informasi layanan aplikasi pemeriksaan berupa SIAP Kinerja. Manfaat yang diperoleh berupa kemudahan akses bagi satker dalam rangka penyelesaian dan arsip atas kertas kerja pemeriksaan.

5. **IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti lembaga perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti oleh BPK.

Realiasasi capaian IKU 5 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14. Perbandingan IKU 5 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%

Pencapaian IKU 5 pada tahun 2021 sebesar 100% atau **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, tidak ada permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan sehingga IKU ini tetap terealisasi sebesar 100% meskipun tidak ada permintaan pemeriksaan.

Perbandingan capaian IKU 5 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi IKU 5 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target
	2020	2021	2022	2023	2024		

								Kinerja 2024
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU 5 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk dapat responsif dalam memenuhi pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.

6. **IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Realiasasi capaian IKU 6 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 16. Perbandingan IKU 6 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,39%	100%

Pencapaian IKU 6 pada tahun 2021 sebesar 100,39% atau **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan. Capaian realisasi di atas berdasarkan enam realisasi pemeriksaan tematik lokal dibandingkan dengan enam rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal serta ditambah dengan alokasi skor untuk pemeriksa yang terlibat sebesar 0,39%. Adapun pemeriksaan tematik lokal yang telah dilaksanakan yaitu pemeriksaan kinerja atas pelayanan perizinan dan penanaman modal dan pemeriksaan kinerja atas kemandirian fiskal yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2021.

Perbandingan capaian IKU 6 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi IKU 6 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,39%	100,39%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU 6 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menyusun rencana pemeriksaan atas tematik lokal yang selaras dengan isu strategis, RPJMN/RPJMD, dan SDG's.

Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan pemanfaatan teknologi dan informasi layanan aplikasi pemeriksaan berupa SIAP Kinerja. Manfaat yang diperoleh berupa kemudahan akses bagi satker dalam rangka penyelesaian dan arsip atas kertas kerja pemeriksaan.

7. **IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Pegawai BPK dapat memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK yang dilakukan melalui survei.

Realiasasi capaian IKU 7 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18. Perbandingan IKU 7 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,49	4,57

Pencapaian IKU 7 pada tahun 2021 yaitu Sangat Memuaskan dengan skor 4,57, namun masih **belum memenuhi target** yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, nilai ini mengalami penurunan. Untuk ke depannya, BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Selatan akan berupaya mendorong pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi Nilai Dasar BPK.

Perbandingan capaian IKU 7 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 19. Perbandingan Realisasi IKU 7 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Pemeriksaan Tematik Lokal	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,57	91,40%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU 7 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan. Target RIR dan PK Tahun 2021 untuk Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK sebesar 5,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan pencapaian RIR dan PK tersebut. Untuk meningkatkan capaian tersebut, hal-hal yang dapat diupayakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah melakukan peningkatan sosialisasi dalam bentuk konkrit serta meningkatkan pengawasan implementasi Nilai Dasar BPK kepada seluruh pegawai dan pimpinan BPK.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan berpertisipasi aktif dalam pengukuran indikator berbasis digital. Hal tersebut bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei *realtime.*

8. IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satuan kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK.

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)

- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Realiasasi capaian IKU 8 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 20. Perbandingan IKU 8 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	AA (93,14)	AA (94,80)

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 406/ND/XI/09/2021 tanggal 21 September 2021, pencapaian IKU 8 pada tahun 2021 adalah AA (Sangat Memuaskan) dengan skor 93,14 dan **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020, nilai ini mengalami penurunan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk meningkatkan capaian target dengan terus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Itama atas evaluasi AKIP.

Perbandingan capaian IKU 8 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 21. Perbandingan Realisasi IKU 8 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	AA (93,14)	103,43%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU 8 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target Renstra sampai dengan tahun 2024. BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus melakukan perbaikan terhadap penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun-tahun berikutnya dengan memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan sehingga tersaji informasi yang informatif dan relevan.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan antara lain pemanfaatan portal intranet BPK dengan melakukan evaluasi dan penilaian SAKIP melalui *prisma-sakip.bpk.go.id.*

9. IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, SiPTL). Untuk mendorong *IT Culture* di BPK, seluruh satuan kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Realiasasi capaian IKU 9 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 22. Perbandingan IKU 9 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	98,36%	98,36%

Pada tahun 2021, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 98,36% atau **telah memenuhi target** dengan rincian sebagai berikut.

a. Tingkat pemanfaatan layanan dasar sebesar 100%
b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum sebesar 93,44%
c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan sebesar 100%
d. Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan sebesar 0%

Perbandingan capaian IKU 9 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi IKU 9 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	98,36%	98,36%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU 9 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan menerapkan *IT Culture* melalui pemanfaatan layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, SiPTL) yang telah disediakan oleh Biro TI. Manfaat yang telah dirasakan yaitu berupa kemudahan akses serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

10. IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik *(best practice). Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh unit/satuan kerja selain pengusul BP. Aktivitas manajemen pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satuan kerja mempraktekkan manajemen pengetahuan, khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan

pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan penerapan pengetahuan.

Realiasasi capaian IKU 10 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan IKU 10 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	200%

Pada tahun 2021, capaian Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan adalah sebesar 100% atau **telah memenuhi target.** Adapun pencapaian realisasi ini berdasarkan realisasi Sub IKU berikut.

a. Realisasi Sub IKU 10.1 tentang Tingkat Penyusunan BP sebesar 100%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyusun BP yang berjudul "1st". Berdasarkan Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 27/ND/XII.1/01/2022 tanggal 12 Janauri 2022 bahwa usulan BP yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan judul "1st" dapat dipertimbangkan sebagai ***Innovative Practice.***
b. Realisasi Sub IKU 10.2 tentang Tingkat Penerapan BP sebesar 100%. Capaian Sub IKU ini menjadi Sub IKU bonus dikarenakan usulan BP yang disampaikan pada tahun 2020 dengan judul "Dashboard Informasi Agenda Kalan & Nota Kedinasan" masuk dalam daftar BP terpilih yang dapat direplikasi oleh satuan kerja lain.
c. Realisasi Sub IKU 10.3 tentang Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP) sebesar 100%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan aktivitas MP sebanyak 15 aktivitas yaitu sebagai berikut:
   - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan LKPD TA 2020 dengan Metode *Distance Learning;*
   - Workshop Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Masa Darurat Pandemi COVID-19;
   - Mentoring Penyusunan Instruksi Kerja tentang Pembuatan Informasi Hukum;
   - Mentoring Pembuatan Modul Praktis Penggunaan Aplikasi SAS;
   - Mentoring Pembuatan Media Pengingat Presensi;

- Mentoring Penyusunan Instruksi Kerja terkait Panduan Pengelolaan Agenda Kalan dan Penggunaan Aplikasi Pengingat Agenda Otomatis pada Sistem Pengelolaan Agenda Kalan;
- Forum Berbagi Pengetahuan Penyusunan Dokumen ZI-WBK;
- Forum Berbagi Pengetahuan Pencapaian WBBM;
- Coaching terhadap pegawai An. Hafiz Majidi;
- Coaching terhadap pegawai An. Rendhy P. Hadi;
- Coaching terhadap pegawai An. Anisa Letisia P;
- Mentoring CPNS An. Siti Rizky Amalia;
- Mentoring CPNS An. Muhammad Taufik Fitriono;
- Bimbingan Teknis dan Asistensi Pemutakhiran Data Mandiri MySAPK BKN; dan
- Evaluasi Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Periode Penilaian s.d. Juni 2021.

Perbandingan capaian IKU 10 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 25. Perbandingan Realisasi IKU 10 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU 10 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berupaya untuk mempertahankan capaian IKU ini.

11. IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan.

Realiasasi capaian IKU 11 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 26. Perbandingan IKU 11 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,95	3,72

Pada tahun 2021, realisasi IKU ini sebesar 3,95 (Memuaskan) atau **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian IKU 11 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi IKU 11 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,95	103,95%

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian IKU 11 pada tahun 2021 telah memenuhi target Renstra sampai dengan tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan.

Upaya efisiensi yang dilakukan dalam pengukuran indikator ini adalah perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi digital. Dengan adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak surveyor. Perubahan ini

bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak surveyor berupa efisiensi tenaga surveyor, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei *realtime*.

12. IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan Pegawai BPK.

Realiasasi capaian IKU 12 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 28. Perbandingan IKU 12 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%

Pada tahun 2021, realisasi IKU ini sebesar 100% atau **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan. Sebanyak 122 pegawai telah memenuhi standar jam diklat yang ditetapkan.

Perbandingan capaian IKU 12 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 29. Perbandingan Realisasi IKU 12 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian IKU 12 ini telah memenuhi target Renstra sampai dengan tahun 2024. Setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan berperan aktif dalam pemenuhan jam diklat yang ditetapkan.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan diklat secara mandiri di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Selatan yang telah disetujui oleh Badan Diklat PKN. Manfaat penerapan diklat secara mandiri antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas dan belanja barang.

13. IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat kinerja anggaran mengukur capaian kinerja atas penggunaaan anggaran satuan kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. EPA adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada satuan ekrja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfataan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaand an tanggung ajwab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Realiasasi capaian IKU 13 Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 30. Perbandingan IKU 13 Tahun 2021 dan 2020

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	91,38%	91,07%

Pada tahun 2021, realisasi IKU ini sebesar 91,38% atau **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan. Capaian tersebut terdiri dari nilai EKA sebesar 87,10% dan nilai EPA sebesar 97,79%.

Perbandingan capaian IKU 13 terhadap target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 31. Perbandingan Realisasi IKU 13 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021	Realisasi 2021 Dibanding Target
	2020	2021	2022	2023	2024		

								Kinerja 2024
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	91,38%	105,03%

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian IKU 13 ini telah memenuhi target Renstra sampai dengan tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tercapainya target kinerja anggaran karena BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya sebagai berikut:

a. Komitmen bersama dari satker untuk selalu berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
b. Berpartisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-Jala) setiap triwulan. Forum ini bertujuan antara lain menyampaikan perkembangan kebijakan penganggaran dan implementasinya, mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan mencari solusi atas permasalahan yang ada; dan
c. Pengelolaan manajemen kinerja atas aspek implementasi satker yang menjadi bagian penilaian indikator kinerja keluaran.

Untuk mempertahankan capaian kinerja anggaran ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan upaya sebagai berikut:

a. Meningkatkan capaian keluaran dan indikator kinerja keluaran yang berkontribusi terhadap kinerja anggaran; dan
b. Melakukan penilaian kembali atas DIPA/POK satker dengan memperhatikan kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) DIPA per triwulan dengan realisasi anggaran per triwulan, target penyelesaian Rincian Output (RO) DIPA per triwulan dengan realisasi RO per triwulan, kesesuaian akun dengan Bagan Akun Standar (BAS) untuk penyusunan RPD dan target penyelesaian RO DIPA pada pelaksanaan per triwulan;
c. Melakukan penajaman kegiatan prioritas, efisiensi, dan optimalisasi terhadap pagu anggaran pada DIPA/POK;
d. Memastikan pencapaian RO yang terdapat dalam DIPA/POK dan optimalisasi penyerapan anggaran;

e. Menyelesaikan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan melakukan revisi RUP;
f. Mempercepat penyelesaian tagihan untuk meminimalisasi penumpukan tagihan pada akhir tahun anggaran; dan
g. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak untuk peningkatan kinerja anggaran.

D. Anggaran dan Realisasi

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp22.049.063.000,00 yang terbagi ke dalam anggaran RKP sebesar Rp9.320.339.000,00 dan RKSP sebesar Rp12.728.724.000,00. Berikut tabel anggaran dan realisasi RKP dan RKSP Tahun 2021.

Tabel 32. Perbandingan Anggaran dan Realisasi RKP 2021

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi (Rp)	%
1.	LHP BPK Perwakilan	5.059.777.000,00	25 LHP	4.944.315.414,00	97,72
2.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	242.226.000,00	130 LHP	242.225.100	100
3.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	2.853.541.000,00	26 LHP	2.827.848.259,00	99,10
4.	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	538.995.000,00	1 LHP	533590.250,00	99
5.	Laporan pemantauan TLHP	98.058.000,00	28 Laporan	78.560.000,00	80,12
6.	Laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah	201.522.000,00	28 Laporan	179.247.861,00	88,95
7.	Rumusan Bahan Pendapat	9.063.000,00	1 Rumusan	8.976.100,00	99,04
8.	Layanan Administrasi Pemeriksaan	259.548.000,00	12 Laporan	233.540.788,00	89,98
9.	Sumbangan IHPS	45.612.000,00	2 SIHPS	43.845.026,00	96,13
10.	Laporan Profil Entitas	11.997.000,00	14 Laporan	8.577.000,00	71,49
	Jumlah	**9.320.339.000,00**	**267 Keluaran**	**9.100.725.798,00**	**97,64**

Tabel 33. Perbandingan Anggaran dan Realisasi RKSP 2021

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.656.459.000,00	20 Laporan	1.575.726.453,00	95,13
a.	Layanan Tata Usaha	233.399.000,00		222.404.824,00	95,29
b.	Layanan Kehumasan	217.600.000,00		206.859.138,00	95,06

c.	Layanan SDM	278.702.000,00		276.834.099,00	99,33
d.	Layanan Keuangan	229.805.000,00		217.025.123,00	94,44
e.	Layanan Umum dan TI	387.958.000,00		384.467.167,00	99,10
f.	Layanan Hukum	168.241.000,00		166.868.172,00	99,18
g.	Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK	109.225.000,00		78.900.000,00	72,24
h.	Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	31.529.000,00		22.367.930,00	70,94
2.	Layanan Sarana Internal	206.998.000,00	2 Unit	205.225.900,00	99,14
3.	Layanan Perkantoran	10.865.267.000,00	1 Layanan	10.749.384.576,00	98,93
a.	Gaji dan Tunjangan	7.394.399.000,00		7.325.761.222,00	99,07
b.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.470.868.000,00		3.423.623.354,00	98,64
1)	Layanan Perkantoran Bidang TU	318.839.000,00		297.650.939,00	93,35
2)	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	38.400.000,00		34.500.000,00	89,84
3)	Layanan Perkantoran Bidang SDM	135.568.000,00		126.691.530,00	93,45
4)	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	236.640.000,00		230.932.000,00	97,59
5)	Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	2.741.421.000,00		2.733.848.885,00	99,72
	Jumlah	**12.728.724.000,00**	**23 Keluaran**	**12.530.336.929,00**	**98,44**

Perkembangan anggaran dan realisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 s.d. 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 34. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d. 2021

Keterangan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Anggaran	24.151.977 000,00	22.233.075.000,00	22.049.063.000,00
Realisasi	23.736.891.142,00	21.856.359.097,00	21.631.062.727,00
Persentase	98,00%	98,31%	98,10%

Gambar 6. Grafik Perkembangan Anggaran dan Realisasi Tahun 2019 s.d. 2021

BAB IV
PENUTUP

LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas pelaksanaan kinerja pada Tahun Anggaran 2021. LAK ini juga merupakan sumbangan untuk penyusunan LAK AKN VI BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh skor kinerja sebesar 100,36 atau telah memenuhi target yang ditetapkan. Indikator kinerja yang telah mencapai target atau pun melebihi target sebanyak 11 (sebelas) indikator dan indikator yang belum memenuhi target sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu:

1) IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; dan
2) IKU 7 tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

Atas indikator kinerja yang belum memenuhi target, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan berupaya untuk terus melakukan langkah perbaikan dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan visi, misi, dan nilai dasar BPK serta meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk indikator kinerja yang telah mencapai target, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berupaya mempertahankan pencapaian dari tahun ke tahun dengan menerapkan rencana aksi yang telah disusun.

LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dan organisasi BPK pada umumnya. LAK ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranan BPK di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran I

Target Pencapaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas; dan • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp23.766.943.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp9.773.076.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	Rp13.993.867.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

Lampiran II

Formulir Pengukuran Kinerja

Tingkat Satuan Kerja Eselon II Badan Pemeriksa Keuangan

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas; dan • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp23.766.943.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90,67%
	Rp9.773.076.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%
	Rp13.993.867.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,94%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,43%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,39%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,49)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	AA (93,14)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	98,36%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,95)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	91,38%